

PERAN KNPI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH MURUNG RAYA

Taupikurahman¹, Indiaty², Ratih Nindita³, Bresca Merina⁴

^{1,2,3}Universitas Waskita Dharma

⁴Universitas Proklamasi 45

sakhaalmalik10@gmail.com¹, ini.indiaty@gmail.com², ratihnkirana@gmail.com³,
brescamerina1@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus KNPI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNPI memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah melalui keterlibatan aktif pada sektor sosial, ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan. Kolaborasi antara KNPI dan pemerintah daerah terwujud dalam berbagai program, seperti pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, pelatihan pemuda, serta inovasi berbasis teknologi berupa aplikasi beasiswa daerah. Namun, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah yang luas, serta keterbatasan akses informasi. Meskipun demikian, KNPI mampu menunjukkan peran inovatif sebagai agen perubahan dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: **KNPI, Pembangunan Daerah, Kolaborasi, Pemuda, Partisipasi**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian National Youth Committee (KNPI) in supporting regional development through collaboration with the local government in Murung Raya Regency. The study employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research informants included KNPI administrators, local government officials, community leaders, and members of the public. The results of the study indicate that KNPI plays a strategic role in regional development through active involvement in the social, economic, educational, and youth sectors. Collaboration between KNPI and the local government is reflected in various programs, such as creative economy development, food security initiatives, youth training, and technology-based innovations in the form of a regional scholarship application. However, the implementation of this

collaboration still faces several challenges, including limited human resources, the wide geographical area of the region, and limited access to information. Despite these obstacles, KNPI has demonstrated an innovative role as an agent of change and as a bridge between the government and the community. This study emphasizes that collaboration between the government and youth organizations is an important factor in achieving participatory, inclusive, and sustainable regional development.

Keywords: *KNPI, Regional Development, Collaboration, Youth, Participation*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan publik, yang didukung oleh tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah berfokus pada optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gunawan & Khosihan, 2026). Menurut Khamdanah et al. (2026), keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan data, dan administrasi yang efektif dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi tersebut mendudukkan masyarakat sebagai penerima manfaat atau objek dan juga sebagai pelopor atau subjek pembangunan itu sendiri (Agustin & Sukmana, 2023). Namun, dalam praktiknya, tata kelola pembangunan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kendala administratif serta keterbatasan akses informasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan model pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok pemuda yang berpotensi besar untuk ikut serta dalam tata kelola pembangunan (Khamdanah et al., 2026).

Di Kabupaten Murung Raya, terdapat kelompok pemuda yang terorganisasi melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI sebagai organisasi pemuda di jalur pendidikan nonformal menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan anggota, khususnya bagi pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Program pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja (Indrajaya, 2012; Pahlepi et al., 2022). KNPI di Kabupaten Murung Raya menunjukkan peran strategis dalam pembangunan daerah melalui berbagai program yang dilaksanakan secara mandiri maupun kolaboratif dengan pemerintah daerah di sektor ekonomi, pendidikan, hingga olahraga. Kabupaten Murung Raya sendiri berpusat di Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang cukup menantang, ditandai oleh jarak antarwilayah yang relatif jauh dan aksesibilitas yang masih terbatas di beberapa daerah. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam hal distribusi informasi, pelayanan publik, serta efektivitas program pemerintah

yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan Masyarakat (Darman, 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelompok pemuda menjadi semakin penting. Dalam perspektif tata kelola pemerintah atau *collaborative governance*, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama biasa, tetapi sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara setara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menekankan adanya dialog, kepercayaan, serta pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor dalam mencapai tujuan bersama.

KNPI memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani berbagai keterbatasan tersebut. Keterlibatan pemuda dalam berbagai program, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga inovasi berbasis teknologi, menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemuda tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan peran penting KNPI. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2025) menunjukkan bahwa KNPI memiliki peran strategis dalam memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan politik, pelatihan anti-narkoba, serta kegiatan sosial. Selain itu, KNPI juga berfungsi sebagai mitra strategis dan kritis pemerintah dalam memberikan masukan kebijakan serta solusi terhadap permasalahan daerah. Selanjutnya, penelitian oleh Azzahra et al. (2025) menegaskan bahwa KNPI berperan penting dalam meningkatkan *civic engagement* generasi muda melalui pengembangan kepemimpinan, pembentukan karakter, serta program ekonomi kreatif. Keterlibatan aktif pemuda dalam program KNPI terbukti mampu meningkatkan keterampilan sosial, rasa nasionalisme, serta mendorong kemandirian ekonomi. Khamdanah et al. (2026) menambahkan bahwa pemuda, melalui pendekatan partisipatif dan digitalisasi, tidak hanya berperan dalam pendataan dan monitoring pembangunan, tetapi juga terlibat dalam perencanaan melalui forum musrenbang. Sementara itu, penelitian Pahlepi et al. (2022) menunjukkan bahwa KNPI berperan sebagai sarana pendidikan politik pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, diskusi politik, dan sosialisasi pemilu. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan pendanaan dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa KNPI memiliki peran penting dalam pemberdayaan pemuda, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, kajian mengenai bentuk dan tingkat kolaborasi antara KNPI dan

pemerintah daerah dalam konteks pembangunan lokal, khususnya di Kabupaten Murung Raya, masih terbatas dan belum teridentifikasi secara komprehensif. Selain itu, berbagai kendala dalam pelaksanaan program juga berpotensi memengaruhi efektivitas peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan KNPI dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami keterlibatan organisasi kepemudaan, khususnya KNPI, dalam pembangunan daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena daerah tersebut memiliki karakteristik geografis dan sosial yang menantang, serta menunjukkan adanya peran aktif KNPI dalam berbagai program pembangunan daerah. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang meliputi Ketua KNPI, pengurus KNPI, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat atau merasakan dampak dari program KNPI.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan untuk menggali informasi terkait peran KNPI, bentuk kolaborasi dengan pemerintah, serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan program yang dijalankan oleh KNPI di lapangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian di analisa menggunakan model analisis interaktif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran KNPI dalam Pembangunan Daerah

Pemuda merupakan salah satu kelompok strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki potensi sebagai agen perubahan, inovator, dan penggerak sosial (Maryani, 2025). Organisasi kepemudaan menjadi wadah yang berfungsi mengorganisir, mengarahkan, dan mengembangkan kapasitas pemuda secara kolektif. Organisasi kepemudaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan individu, tetapi juga

sebagai medium partisipasi sosial yang memungkinkan pemuda terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat (Aulya et al., 2025). KNPI merupakan salah satu organisasi pemuda yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Secara kelembagaan, KNPI berfungsi sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan yang bertujuan untuk mengoordinasikan, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas serta partisipasi pemuda dalam pembangunan (Indrajaya, 2012). Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan KNPI Kabupaten Murung Raya tahun 2025, KNPI menunjukkan peran aktif dalam berbagai sektor pembangunan daerah, meliputi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan. Pada aspek sosial, kegiatan peduli banjir menjadi bentuk nyata kepedulian KNPI terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Salah satu masyarakat terdampak banjir mengatakan, “... *anak-anak muda KNPI sangat aktif membantu dilapangan, kami merasa tidak sendirian.*” (Wawancara dengan Masyarakat). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya merasakan manfaat bantuan secara material, tetapi juga merasakan adanya perhatian, solidaritas, dan kepedulian sosial dari para pemuda yang tergabung dalam KNPI. Kehadiran KNPI di tengah situasi bencana memberikan rasa aman dan memperkuat semangat masyarakat untuk menghadapi kondisi yang sulit.



Gambar 1. Keterlibatan Pemuda KNPI dalam Aksi Peduli Banjir

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Kegiatan ini tidak hanya berupa penyaluran bantuan logistik, tetapi juga melibatkan pemuda dalam aksi tanggap darurat dan pendampingan masyarakat di lokasi terdampak. “... *mereka tanggap dan langsung turun kelapangan menyiapkan bantuan dan menjaga keamanan kami selama dipengungsian*” (Wawancara dengan salah satu Masyarakat). Keterlibatan langsung pemuda dalam kegiatan tersebut turut menumbuhkan

rasa empati, solidaritas sosial, serta kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Peran tersebut menunjukkan bahwa KNPI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kepemudaan yang berorientasi pada pengembangan generasi muda, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan penguatan solidaritas sosial. Keterlibatan aktif KNPI dalam kegiatan kemanusiaan ini mencerminkan tingginya rasa tanggung jawab sosial pemuda terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ramadhan dan Warsono (2025) menambahkan bahwa pemuda sebagai agen sosial memiliki peran aktif dalam menumbuhkan kepedulian sosial.

Selain itu, dalam bidang pengembangan kapasitas pemuda, KNPI Kabupaten Murung Raya juga menunjukkan komitmennya melalui berbagai program peningkatan keterampilan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan seperti *beauty class* dan pelatihan kepemimpinan pemuda menjadi bagian dari strategi organisasi dalam mempersiapkan generasi muda yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.



Gambar 2. Pelatihan *Beauty Class*

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Pelatihan *beauty class* memberikan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha di bidang jasa kecantikan, sehingga mendorong kemandirian ekonomi pemuda. “pelatihan *beauty class* ini kami adakan untuk memberikan keterampilan praktis kepada pemuda, khususnya perempuan, agar bisa menjadi peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.” (Wawancara dengan Pengurus KNPI). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi pemuda. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki, peserta diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri, meningkatkan

pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap peluang kerja formal yang jumlahnya terbatas. Program ini sekaligus menjadi salah satu bentuk upaya KNPI dalam mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, pelatihan kepemimpinan berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memperkuat kapasitas organisasi pemuda dalam berkontribusi pada kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali berbagai materi yang berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi efektif, manajemen organisasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Kompetensi tersebut penting untuk mempersiapkan pemuda agar mampu menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 3. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda KNPI

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Pelatihan kepemimpinan juga dilengkapi dengan praktik lapangan, seperti simulasi penanganan kondisi darurat, termasuk mengatasi gas terbakar dan pelatihan *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR), yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan teknis pemuda dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan pertolongan pertama secara tepat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu masyarakat *“kami tidak hanya diberikan materi, tetapi juga praktik langsung, sehingga siap jika terjadi kondisi darurat.”* (Wawancara dengan salah satu Masyarakat). Pernyataan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis praktik memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan sekadar penyampaian teori. Peserta merasa lebih siap dan memiliki gambaran nyata mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat di lingkungan masyarakat. Selain itu, pengurus KNPI juga menyampaikan bahwa *“pelatihan ini dirancang agar pemuda memiliki kemampuan dasar dalam menghadapi situasi darurat, sehingga mereka bisa menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.”* (Wawancara dengan pengurus KNPI). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tujuan pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga untuk mempersiapkan pemuda sebagai sumber daya sosial

yang mampu berkontribusi dalam upaya penanggulangan keadaan darurat di tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kepemimpinan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi situasi nyata di masyarakat. Organisasi kepemudaan seperti KNPI berperan dalam membentuk kepemimpinan, keterampilan sosial, serta kesiapsiagaan pemuda dalam berbagai situasi (Azzahra et al., 2025). Pembentukan keterampilan kepemimpinan dan kesiapsiagaan sejak dini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pemuda sebagai sumber daya yang mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan (Laksono et al., 2026). Dengan demikian, pemuda tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan organisasi, tetapi juga kesiapan dalam merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat. Selain itu, penyelenggaraan malam anugerah pemuda berprestasi menjadi bentuk apresiasi terhadap generasi muda sekaligus mendorong motivasi dan daya saing pemuda di daerah.



Gambar 4. Malam Anugerah Pemuda Berprestasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Kegiatan ini memberikan pengakuan atas capaian dan kontribusi pemuda dalam berbagai bidang, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk turut berprestasi. Lebih lanjut, ajang ini juga memperkuat budaya kompetisi yang positif serta mendorong lahirnya generasi muda yang aktif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KNPI bahwa *“kegiatan malam anugerah ini memang kami buat untuk memotivasi anak-anak muda supaya lebih*

aktif dan berprestasi. Harapannya, mereka bisa saling bersaing secara positif dan terus berinovasi, sehingga bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.” (Wawancara dengan Ketua KNPI)

Secara keseluruhan, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa KNPI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berperan secara multidimensional. Peran ini mencerminkan adanya sinergi antara pemberdayaan pemuda dan pembangunan daerah, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Bentuk Kolaborasi KNPI dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNPI di Kabupaten Murung Raya telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan. Kolaborasi tersebut meliputi dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan KNPI dalam program-program pemerintah, seperti pelatihan kerja pemuda, pengembangan ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan.



Gambar 5. Peresmian Angkringan Pemuda KNPI

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Pada aspek ekonomi, peresmian angkringan pemuda mencerminkan peran KNPI dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pengembangan usaha berbasis pemuda sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, yang menunjukkan dukungan nyata terhadap inisiatif usaha pemuda. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi simbol dimulainya usaha, tetapi juga mencerminkan sinergi antara pemuda dan berbagai pihak dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi menjadi landasan penting dalam mendorong inovasi lokal yang kontekstual dan

berkelanjutan (Arifin et al., 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberhasilan suatu program pemberdayaan. Laksono et al. (2026) menjelaskan bahwa pencapaian tujuan bersama dalam suatu program sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang intensif, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dapat diintegrasikan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat. Selain itu, keberadaan angkringan pemuda diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, kegiatan penguatan ketahanan pangan menunjukkan keterlibatan KNPI dalam mendukung program pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua KNPI yang menyatakan bahwa *“kami sudah terlibat dalam peningkatan ekonomi kreatif pemuda melalui UMKM, program ketahanan pangan, serta kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”* (Wawancara dengan Ketua KNPI). Temuan tersebut menunjukkan bahwa KNPI tidak hanya berperan sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi daerah.



Gambar 6. Penguatan Ketahanan Pangan

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Kegiatan ini diwujudkan melalui pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman pangan, seperti penanaman mentimun, yang melibatkan pemuda secara langsung dalam proses produksi. Selain itu, program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi pemuda. keterlibatan pemuda dalam program ketahanan pangan berbasis partisipasi mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta kualitas tata kelola pembangunan di tingkat lokal (Khamdanah et al., 2026). Dengan demikian, keterlibatan KNPI dalam ketahanan pangan turut memperkuat kemandirian masyarakat serta

mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, KNPI juga berperan dalam memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah, salah satunya melalui inisiatif pengembangan aplikasi beasiswa untuk mempermudah akses informasi dan administrasi bagi mahasiswa. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan adanya hubungan sinergis antara pemerintah dan KNPI, di mana pemerintah berperan sebagai penyedia kebijakan dan sumber daya, sedangkan KNPI berperan sebagai pelaksana sekaligus penghubung dengan masyarakat, khususnya pemuda.

Kendala dalam Kolaborasi

Meskipun kolaborasi telah berjalan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau, serta keterbatasan akses informasi di beberapa daerah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KNPI yang menyatakan bahwa *“sumber daya manusia di Murung Raya memang masih terbatas, sehingga dalam pelaksanaan program kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.”* (Wawancara dengan Ketua KNPI). Temuan ini sejalan dengan penelitian Khamdanah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan akses informasi menjadi hambatan dalam tata kelola pembangunan berbasis partisipasi pemuda. Selain itu, penelitian Pahlepi et al. (2022) juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama organisasi kepemudaan.

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas kolaborasi adalah kondisi geografis wilayah. Jarak antarwilayah yang relatif jauh menyebabkan pelaksanaan program membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Di samping itu, tantangan dalam penyebaran informasi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, *“masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara merata, sehingga partisipasi dalam beberapa program belum maksimal.”* (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat). Hal ini sejalan dengan Syavitri dan Rodiyah (2026) yang menemukan bahwa keterbatasan partisipasi masyarakat sering terjadi akibat kurangnya penyebaran informasi serta dominasi kelompok tertentu dalam akses komunikasi pembangunan. Senada dengan itu, Zulhamzah dan Mawar (2025) menegaskan bahwa faktor waktu dan aksesibilitas tempat tinggal turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi, serta kendala waktu menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pelaksanaan program KNPI di Kabupaten Murung Raya.

Inovasi dan Kontribusi KNPI

KNPI juga menunjukkan peran inovatif dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah inisiatif pengembangan aplikasi

beasiswa daerah untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan konsep *digital governance*, di mana pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik (Khamdanah et al., 2026). Digitalisasi dalam tata kelola pembangunan mampu memperkuat transparansi dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Selain itu, keterlibatan KNPI dalam program lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. *“Kami berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa kami bantu carikan solusi melalui program yang kami jalankan.”* (Wawancara dengan Pengurus KNPI). Hal ini menunjukkan bahwa KNPI tidak hanya menjalankan program, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Anggraini et al. (2025) dan Aulia et al. (2023) yang menyatakan bahwa KNPI berfungsi sebagai mitra strategis dan kritis pemerintah dalam memberikan masukan kebijakan serta solusi terhadap permasalahan daerah. Sinergi antara kedua aktor tersebut menciptakan hubungan yang saling melengkapi di mana dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperluas jangkauan program pembangunan, serta menghasilkan inovasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KNPI dalam pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya mencerminkan model kolaborasi yang dinamis antara pemerintah dan pemuda. KNPI tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan peran sosial, ekonomi, dan inovatif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan KNPI menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KNPI di Kabupaten Murung Raya memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Peran tersebut tercermin dalam keterlibatan aktif KNPI pada berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan, yang menunjukkan fungsi organisasi tidak hanya sebagai wadah pemuda, tetapi juga sebagai agen pembangunan. Bentuk kolaborasi antara KNPI dan pemerintah daerah menunjukkan adanya hubungan yang sinergis, di mana pemerintah berperan sebagai penyedia kebijakan dan sumber daya, sementara KNPI berperan sebagai pelaksana program sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, KNPI juga menunjukkan kontribusi inovatif melalui pengembangan program berbasis teknologi dan solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah yang luas, serta keterbatasan akses informasi yang memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses informasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, keberadaan KNPI menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat peran pemuda sebagai subjek aktif dalam Pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Sukmana, H. (2023). Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa melalui Karang Taruna di Pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 438–454.
- Anggraini, N. H., Ramadhani, D., Ibnuwafi, Z., Saputri, R. Y., & Mentari, A. (2025). Membangun Partisipasi Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan DPD KNPI Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 1–8.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, R., Ahmad, A., Priyatno, I. S., Tahir, H., Liputo, I. R., & Disastra, Y. I. (2025). Kolaborasi dan Ekosistem Inovasi untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan: Refleksi dan Relevansinya bagi Provinsi Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(1), 393–401. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i1.1825>
- Aulia, P., Daulay, Z. Z., Octavia, C., & Basri, M. (2023). Peran Karang Taruna Demi Mewujudkan Pembangunan Desa Punden Rejo yang Maju. *Journal of Human and Education*, 3(2), 477–485.
- Aulya, T. M., Dalimunthe, N. A., Nasution, C. P., Harahap, D. A., & Putri, S. M. (2025). Analisis Kebijakan Pembiayaan Publik: Makna Strategis APBN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 368–375. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v3i4.2265>
- Azzahra, M. A., Novaliana, A., Rama, A., Sulaksono, T. P., & Mentari, A. (2025). Peran KNPI dalam Meningkatkan Civic Engagement Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 732–741.
- Darman, M. (2025). Pemkab Murung Raya Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Listrik Lima Tahun Kedepan. In *HumaBetang*. <https://humabetang.com/berita/pemkab-murung-raya-prioritaskan-infrastruktur-jalan-dan-listrik-lima-tahun-ke-depan>
- Gunawan, G., & Khosihan, A. (2026). Peran dan Kontribusi Masyarakat dalam

- Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Bagan Sinembah, Riau. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 585–600. <https://doi.org/10.54082/jupin.2291>
- Indrajaya, K. (2012). Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNNPI) dalam Memberdayakan Para Pemuda Putus Sekolah melalui Pelatihan Kecakapan Hidup berbasis Kewirausahaan. *Empowerment Journal*, 1(1), 101–120.
- Khamdanah, S., Kadir, M. A. A., Salmawati, Banggu, M., Saragih, F., & Arsyad, R. Bin. (2026). Implementasi Program Tata Kelola Pembangunan berbasis Partisipasi Pemuda Karang Taruna di Sorong Timur. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 8(1), 96–105. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v8i1.5180>
- Laksono, B. S., Wulandari, S., & Suhindarno, H. (2026). Collaborative Synergy Between Customs and the Government in the Program to Combat Illegal Cigarettes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 13(1), 367–384. <https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.2211>
- Maryani, R. (2025). Partisipasi Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 1185–1195.
- Pahlepi, S. M. R., Idris, A., & Rende, S. (2022). Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pemuda (Studi Kasus KNPI Kecamatan Samarinda Seberang). *Jurnal Administrative Reform*, 10(2), 20–32.
- Ramadhan, R. K., & Warsono. (2025). Peran Pengurus Karang Taruna Waduri dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial di Dusun Seduri Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(11).
- Syavitri, N. A., & Rodiyah, I. (2026). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kajeksan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(2), 291–309.
- Zulhamzah, R., & Mawar, M. (2025). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Nasabah Bank BTPN Syariah. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(4), 1538–1553. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2023>